

**:: POLEMIK PEMBANGUNAN PASAR IR SOEKARNO**

## Kontraktor Proyek Dilarang Ikut Tender Selama 2 Tahun

**SUKOHARJO** – PT Ampuh Sejahtera (PT AS) selaku kontraktor proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno bersama PT Dieng Agung (PT DA) selaku konsultan pengawas akhirnya masuk daftar hitam atau *blacklist* oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dua perusahaan tersebut masuk daftar hitam selama dua tahun terhitung sejak 3 Maret 2014 hingga 2 Maret 2016.

Dari penelusuran *KORAN SINDO*, pengumuman daftar hitam tersebut sudah muncul di situs LKPP di [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id). Pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan perusahaan lain yang juga masuk dalam daftar hitam. Dalam pengumuman di Inaproc LKPP, PT DA berada dalam nomor urut dua sedangkan PT AS berada di nomor urut tiga.

Dengan adanya pengumuman tersebut, dua perusahaan itu tidak bisa mengikuti lelang-lelang proyek yang diadakan oleh pemerintah selama dua tahun ke depan,

baik itu lelang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

PT DA dalam pengumuman itu beralamat di Jalan Tumpang IV Nomor 19, RT/RW 006/005, Kelurahan Benda Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sementara PT AS beralamat di Jalan Bengawan Solo Nomor 2A Tegalarjo RT 03/RW 05, Sukoharjo. Keduanya masuk daftar hitam dalam periode waktu yang sama.

"Pemasukan PT AS dan PT DA masuk daftar hitam sudah sesuai dengan rekomendasi dari BPK," ucap Sekretaris Daerah Sukoharjo Agus Santosa kemarin.

Terkait rekomendasi tersebut, Agus mengaku Pemkab Sukoharjo telah melaksanakannya. Daftar hitam sudah masuk dalam Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. Hanya, daftar hitam di LPSE bersifat lokal khusus di Sukoharjo.

Untuk daftar hitam secara nasional, pihaknya beberapa waktu lalu memang sudah mengirimkan ke LKPP pusat. Lembaga itu-

lah berwenang memasang pengumuman mengenai daftar hitam tersebut. "Kalau sudah masuk daftar hitam di LKPP, berarti sudah tidak bisa mengikuti lelang-lelang proyek, utamanya yang dilelangkan pemerintah selama dua tahun," ujar Agus.

Kepala Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Setda Suk